

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Black Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn: West Publishing.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada.

Ibnu Syamsi, 1994, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta, Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, Asocial Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, 2008, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, Jakarta: RajaGarfindo Persada.

Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta.

Stout H.D, 1994, *De Betekenissen van de Wet, Theoritisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*, Zwolle : W.E.J Tjenk Willink.

Suharizal, Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta : Tafa Media.

Zainudin Ali ,2009, *Metode penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keputusan Presiden Nomor 165 tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenanga, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam

C. Jurnal, Skripsi, dan lain-lain

Rusdi, Dina Rosdiana, 2021, "Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5. No. 1

Susanto, Nur Sri Hari, 2020, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3. No. 3

Mayangsari Anggun, Dkk, 2016, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3

Rastri Paramita, 2021, "Industri dan Pengembangan Budget Issue Brief" *Badan Keahlian DPR RI Jurnal*, vol 3, ed 3,

Pusat Kajian APBN, *Optimalisasi PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan berbasis Sumber Daya Alam*, Jakarta, 2020

D. Sumber Lainnya

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35612/t/DPR+Minta+Pemerintah+Revisi+P+ Nomor+85+Tahun+2021>, diakses pada 20 Januari 2022